

## DIFUSI MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

**Mami Hajaroh, L. Andriani Purwastuti, Rukiyati, dan Bambang Saptono**

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia

email: [mami\\_hajaroh@uny.ac.id](mailto:mami_hajaroh@uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hasil difusi model dan mengukur kriteria model sebagai inovasi. Penelitian ini adalah penelitian difusi, model perumusan kebijakan sekolah ramah anak di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan *mixed qualitative-quantitative method*. Partisipan penelitian ini 10 Sekolah Dasar, total 53 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner, dokumen, dan diskusi terfokus. Teknik analisis data statistik deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perumusan kebijakan sekolah ramah anak memenuhi kriteria bagus sebagai inovasi karena sesuai dengan lima kriteria inovasi yakni keunggulan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), kemampuan diujicobakan (*trialability*), dan kemampuan diamati (*observability*). Hasil difusi juga menunjukkan bahwa sekolah mengadopsi model analisis perumusan kebijakan pendidikan sebagai inovasi. Model ini efektif untuk diterapkan di sekolah untuk menginterpretasi kebijakan dari tingkat makro dan meso ke dalam kebijakan mikro (satuan Pendidikan). Keefektifan tercapai karena adanya kolaborasi yang sinergis antara Tri Pusat Pendidikan (sekolah, masyarakat, dan keluarga) pada tahap interpretasi kebijakan dan program, serta pada tahap pengorganisasian dan aplikasi kebijakan sekolah ramah anak.

*Kata kunci:* kebijakan, difusi inovasi, sekolah ramah anak, satuan pendidikan

## THE DIFFUSION OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL POLICY FORMULATION MODELS AT THE EDUCATION UNIT LEVEL

### Abstract

This study aimed to reveal the results of the diffusion models and measure the criteria of the models as an innovation. This study is diffusion research, a model for formulating child-friendly school policies at the education unit level. This study used a mixed qualitative-quantitative method. The participants of this study were 10 elementary schools, a total of 53 people. The data were collected through interviews, questionnaires, documents, and focused discussions. The data analysis techniques were descriptive statistics and qualitative analysis. The results show that the model for formulating child-friendly school policies met the good criteria as an innovation since it complied with five innovation criteria, namely relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The results of the diffusion also show that schools adopt an analytical model of education policy as an innovation. This model is effective to be applied in schools to interpret policies from the macro and meso levels into micro policies (Education units). Effectiveness is achieved due to synergistic collaboration between the Three Education Centers (schools, communities, and families) at the policy and program interpretation stage, as well as at the stage of organizing and applying child-friendly school policies.

*Keywords:* policy, diffusion of innovation, child-friendly school, education unit

## PENDAHULUAN

Masyarakat yang sedang membangun berkepentingan dengan adanya inovasi, karena inovasi yang berupa gagasan, ide-ide, tindakan, bahkan kebijakan baru merupakan pangkal tolak terjadinya perubahan dalam masyarakat. Dinamika kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta akselerasi pembangunan yang tidak dapat dibendung seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sedemikian cepat mendorong adanya penemuan-penemuan baru (inovasi). Inovasi saling susul menyusul muncul dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan. Dalam konteks kehidupan semacam ini inovasi bukan lagi merupakan sesuatu yang langka. Penggalan dan penemuan segala macam inovasi diharapkan dapat mengubah dan memperbaharui kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, segala macam penemuan inovasi seperti apapun hebatnya menjadi tidak berarti dan tidak akan membawa perubahan dalam masyarakat. Jika tidak didifusikan kepada sebagian besar anggota masyarakat dan diadopsi, inovasi hanya tersimpan tidak memberikan manfaat apapun.

Inovasi dari hasil-hasil penelitian pendidikan yang berupa ide-ide, metode maupun teknologi pembelajaran tidak akan meningkatkan kualitas pendidikan ketika inovasi tidak diadopsi oleh pengguna karena tidak dilakukan difusi. Demikian halnya dengan inovasi kebijakan pendidikan, sebaik apapun kebijakan pendidikan yang disusun jika difusi yang dilakukan tidak mencapai tahap adopsi oleh para implementator kebijakan, maka kebijakan baru tidak akan dapat memberikan perubahan pendidikan secara optimal.

Untuk dapat memastikan bahwa inovasi kebijakan pendidikan yang dilakukan telah diadopsi oleh implementator dan pengguna

inovasi, penting dilakukan penelitian difusi kebijakan pendidikan. Difusi sebagai rangkaian *Research, Development, dan Diffusion (R,D and D)* merupakan salah satu model dari diseminasi-pemanfaatan (*dissemination-utilization*) dari inovasi (Havelock *et al.*, 1971). Dalam paradigma baru penelitian difusi dan praktek (Dearing & Singhal, 2020) para ahli menempatkan tiga arah baru, yakni diseminasi, implementasi dan difusi. Ketiga konsep ini memiliki perbedaan-perbedaan positif. Para peneliti dan praktisi terus menggunakan dan berkontribusi pada konsep dan gagasan difusi meski dalam jalur ini tidak banyak dilakukan oleh para sarjana.

Difusi adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu pada anggota-anggota dari sebuah sistem sosial (Rogers, 2010; Dearing & Singhal, 2020). Tujuan utama proses difusi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Dearing dan Cox (2018) menyebutkan bahwa variabel dependen yang khas dalam penelitian difusi adalah waktu adopsi. Namun, ketika pengadopsi adalah organisasi yang kompleks, penerapan selanjutnya adalah variabel ukuran perubahan yang lebih bermakna. Difusi dapat dinilai dari individu-individu seperti anggota sistem sosial tertentu, organisasi, atau kolektivitas yang lebih besar seperti kota dan negara bagian. Rogers (2010) menjelaskan difusi merupakan studi dari berbagai disiplin. Studi difusi dimulai dari riset bidang komunikasi dan menyebar pada ilmu-ilmu sosial, teknologi, pendidikan, kesehatan publik, dan bidang-bidang yang lain.

Dalam catatan Dearing (2009), sejak tahun 1950-an para peneliti difusi telah mulai menerapkan pengetahuan kolektif

yang dipelajari tentang difusi naturalistik dalam menguji proses intervensi untuk mempengaruhi penyebaran inovasi. Saat ini tujuan difusi telah memberikan bentuk pada diseminasi *science* dalam praktik yang berbasis bukti yang dirancang dengan pra anggapan bahwa difusi tidak hanya untuk menghasilkan validitas internal tetapi untuk meningkatkan kemungkinan validitas eksternal. Choudrie *et al.* (2012) meneliti tentang difusi kultur dan gender di Nigeria dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang dampak budaya dan gender dalam difusi *e-government* pada kelompok etnis asli Nigeria. Harting *et al.* (2009) meneliti difusi inovasi teori dengan mengaplikasikan pendekatan kualitatif untuk menguji kepatuhan terhadap pedoman terapi fisik. Graham, Shipan, dan Volden (2013) menulis Difusi Penelitian Difusi kebijakan (*The Diffusion of Policy Diffusion Research*) tentang pentingnya melakukan difusi terhadap penelitian difusi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian difusi kebijakan perlu disebarluaskan hingga diadopsi oleh para peneliti. Inovasi merupakan variabel *dependent* dari difusi yang mempunyai banyak makna.

Inovasi adalah implementasi produk baru atau yang ditingkatkan secara signifikan berupa layanan atau proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal. Rogers (2010) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, praktek atau obyek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Havelock *et al.* (1971) mengatakan inovasi adalah membuat keputusan perubahan dan dengan sikap penuh harapan untuk memperbaiki cara melakukan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang baru.

Inovasi bukan sekadar penciptaan sesuatu yang baru tetapi juga obat mujarab untuk solusi masalah yang luas. Istilah inovasi semakin sering digunakan oleh pembuat kebijakan, spesialis pemasaran, spesialis iklan dan konsultan manajemen. Dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/Eurostat* (2018) disebutkan *an innovation defines an innovation as a new or improved product or process (or combination there of) that differs significantly from the unit's previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process).*

Lima karakteristik inovasi meliputi: keunggulan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), kemampuan diuji cobakan (*trialability*), dan kemampuan diamati (*observability*) (Rogers, 2010; Ismail, 2006). Damanpour (1996) menyatakan bahwa inovasi dapat dipelajari pada level firma, industri atau level individual. Inovasi pada level organisasi didefinisikan sebagai adopsi ide-ide atau perilaku baru bagi organisasi pengadopsi. Inovasi dalam layanan dan organisasi adalah sesuatu yang baru dalam perilaku, kebiasaan sehari-hari dan cara-cara dalam bekerja yang menunjukkan peningkatan pada kesehatan, efisiensi administrasi, efektivitas biaya atau pengalaman pengguna dan inovasi diimplementasikan dengan tindakan yang direncanakan dan dikoordinasikan (Greenhalgh *et al.*, 2004).

Teori difusi inovasi memainkan peran penting dalam menentukan penetrasi inovasi atau produk di masa depan dengan memahami karakteristiknya (Kumar, 2015). Penelitian difusi model pendidikan nilai yang dilakukan oleh Hajaroh dan Rukiyati (2019) bertujuan mendifusikan inovasi dalam pendidikan kepada pengguna yakni guru. Sebagian besar studi tentang

difusi kebijakan, yaitu proses pembuatan kebijakan di satu pemerintah mempengaruhi pembuatan kebijakan di pemerintah lain. Berfokus pada adopsi kebijakan (Gilardi *et al.*, 2021). Secara sederhana, difusi inovasi mengacu pada proses yang terjadi saat orang mengadopsi ide baru, produk, praktik, filsafat, dan sebagainya (Kaminski, 2011). Difusi model Inovasi dalam penelitian ini berupa model analisis perumusan kebijakan merupakan ide dan praktik baru dalam menginterpretasi kebijakan makro atau meso ke dalam kebijakan di satuan pendidikan (mikro).

Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 merupakan ratifikasi dari kebijakan global *Child Friendly School* (Unicef, 2009; Wright *et al.*, 2009) bertujuan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan SRA. Dalam kerangka konseptual implementasi kebijakan diperlukan langkah-langkah interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi (Widodo, 2010). Berbasis kerangka konsep tersebut disusun sebuah model analisis perumusan kebijakan SRA di tingkat satuan pendidikan melalui sebuah penelitian pengembangan dengan produk model analisis perumusan kebijakan sekolah ramah anak.

Pengembangan model ini dengan asumsi bahwa kebijakan sekolah perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan konteks sosio-kultural sekolah atau masyarakat di sekitar sekolah. Konteks setiap sekolah di Indonesia yang luas dan majemuk ini tidak ada yang sama. Meskipun kebijakan dan program SRA meski dikembangkan

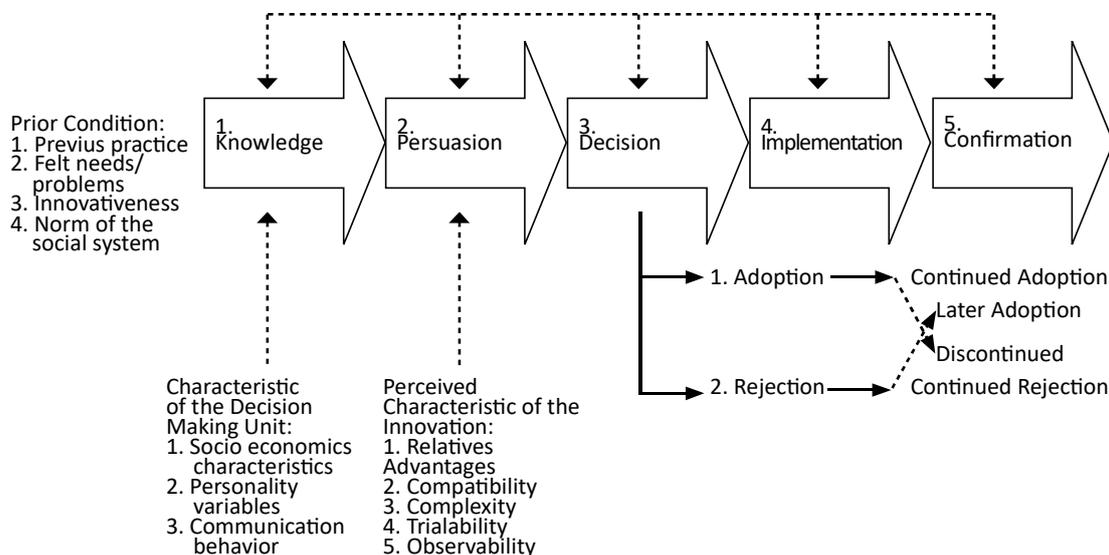
berbasis pada situasi kondisi setempat namun tetap berpegang pada kebijakan nasional. Model ini merupakan inovasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan oleh karena model perlu diuji kepada masyarakat pengguna dalam hal ini guru di Sekolah Dasar apakah inovasi ini memenuhi karakteristik inovasi dan bisa diadopsi oleh sekolah sebagai pengguna.

Tahapan proses difusi untuk pengambilan inovasi pada level individu sebagaimana dijelaskan oleh Rogers (2010) meliputi lima tahap, yakni: *knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation*. Tahapan dalam proses memutuskan untuk inovasi (adopsi inovasi) pada level individu, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Tahap pengetahuan terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan dalam hal ini guru dan sekolah terbuka pada keberadaan inovasi (model analisis perumusan kebijakan) dan bersedia menambahkan pemahamannya pada fungsi inovasi tersebut. Sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi merupakan tahap yang terjadi setelah individu mengetahui unit pembuat keputusan mendapatkan pengetahuan. Keputusan menerima atau menolak inovasi terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan merasa terikat dalam aktivitas yang memandu pada pilihan mengadopsi atau menolak inovasi. Ketika pembuat keputusan menggunakan inovasi dalam aktivitasnya saat itu bermakna sebagai mengimplementasikan inovasi. Pada saat adopter menambahkan tindakan untuk memperkuat keputusan mengadopsi inovasi yang difusikan atau mengubah keputusan menolak inovasi karena penjelasan bertentangan pesan inovasi maka saat ini disebut tahap konfirmasi.

Model analisis kebijakan SRA di tingkat satuan merupakan inovasi strategi

Gambar 1  
*Model Tahap Proses Keputusan Inovasi pada Individu*



*Keterangan: sumber Roger, 2010*

implementasi kebijakan. Model ini penting didifusikan kepada sekolah dan *stakeholder* agar sekolah sebagai unit pembuat keputusan mengadopsi model untuk diimplementasikan di satuan pendidikan. Penelitian ini menguji karakteristik model sebagai inovasi dan mendeskripsikan proses difusi inovasi sesuai tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian difusi untuk memahami proses penyebaran model analisis perumusan kebijakan SRA secara lebih luas di sekolah-sekolah dasar di kawasan pesisir. Penelitian difusi (Katz, 2001) adalah upaya untuk melacak adopsi ide atau inovasi saat menyebarkan, seiring waktu, di antara komunitas calon adopter yang memperoleh informasi melalui media atau komunikasi satu sama lainnya. Penelitian ini melibatkan 10

Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul. Setiap sekolah melibatkan unsur guru, orang tua wali, dan anggota masyarakat yang berjumlah 53 subyek.

Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, dokumen, dan diskusi terfokus. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data proses perumusan kebijakan yang dilakukan dengan *workshop*. Angket digunakan untuk mengumpulkan penilaian peserta terhadap model. Dokumen analisis perumusan kebijakan menjadi sumber informasi untuk keputusan menggunakan adopsi inovasi. Data wawancara dikumpulkan untuk menggali implementasi kebijakan SRA di sekolah, kendala yang dihadapi, dan potensi yang dapat dikembangkan oleh para pemangku kepentingan sekolah. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan data kualitatif dianalisis secara deskriptif

kualitatif (Miles *et al.*, 2018) dengan langkah-langkah: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Model analisis perumusan kebijakan SRA merupakan kerangka konsep yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan dan program di tingkat satuan pendidikan dalam rangka implementasi kebijakan. Sekolah berperan sebagai implementator kebijakan. Model ini merupakan inovasi yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan (*development research*). Sebagai produk riset penting untuk mendifusikan model ini agar diadopsi oleh pengguna.

Kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan sekolah ramah anak, tidak hanya dibahas dalam konteks nasional, tetapi sudah menjadi agenda kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan paling kecil tingkat satuan pendidikan. Kebijakan di tingkat sekolah sangat erat terkait dengan Otonomi Daerah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM) (Hajaroh dkk., 2017). Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan penting melibatkan Tri Pusat Pendidikan (sekolah, orang tua, dan masyarakat). Sebagaimana ditulis oleh Suranto, Hajaroh, dan Hastasari (2020) bahwa peran Tri Pusat Pendidikan di sekolah didukung dengan dikembangkannya konsep MBS. Manajemen implementasi kebijakan sekolah ramah anak berbasis proses kebijakan disajikan pada Gambar 2.

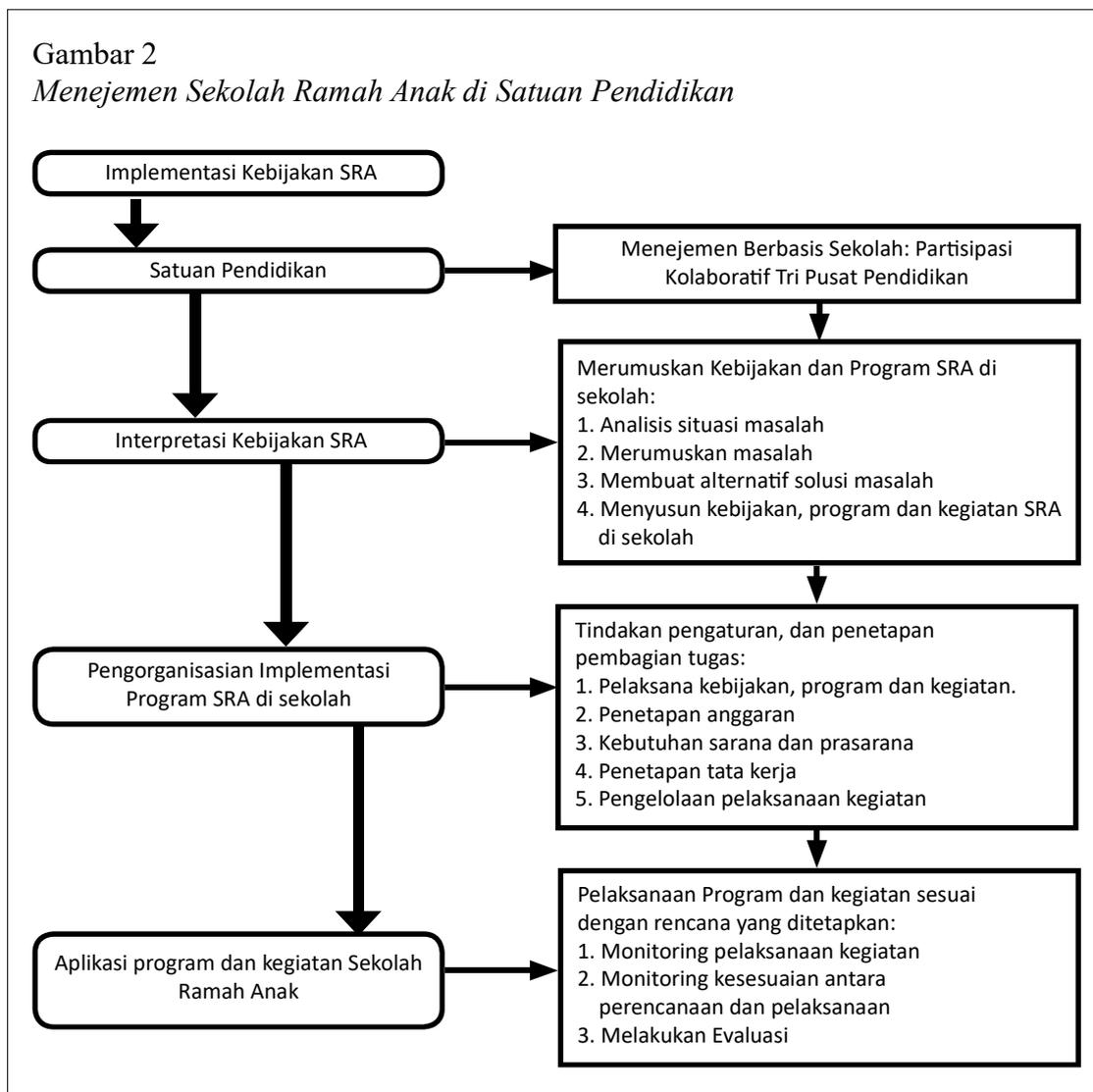
Gambar 2 menunjukkan bahwa analisis perumusan kebijakan sekolah merupakan sebuah proses mengimplementasikan kebijakan dari atas (makro dan meso) ke dalam kebijakan mikro (satuan Pendidikan). Satuan Pendidikan sebagai implementator kebijakan menerapkan manajemen berbasis

sekolah dengan melibatkan orang tua dan komite sekolah atau tokoh masyarakat sebagai tiga unsur dalam pendidikan (Tri Pusat Pendidikan). Tri Pusat Pendidikan berpartisipasi aktif dalam tahap interpretasi kebijakan, tahap implementasi maupun tahap evaluasi. Dalam desain model pada tahap perumusan kebijakan mikro ketiga unsur tripusat pendidikan duduk bersama untuk merumuskan kebijakan dan program sekolah melalui *workshop*. *Workshop* analisis perumusan kebijakan sekolah menjadi media untuk mengembangkan kebijakan dan program SRA. Dalam tahap pengorganisasian dan evaluasi ke 3 unsur akan selalu berada dalam kerja kolaboratif.

Interpretasi adalah tahap penguraian pokok dari suatu kebijakan atau program yang bersifat abstrak agar lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dimengerti oleh para pelaku dan sasaran kebijakan (Widodo, 2010). Dalam melakukan interpretasi kebijakan SRA penting memperhatikan berbagai karakteristik kawasan. Selain juga berdasarkan kebijakan nasional (Permen KPPPA Tahun 2014) dan berbagai variabel dan indikator SRA di kawasan pesisir DIY (Hajaroh *et al.*, 2017). Kebijakan Nasional digunakan sebagai arah utama yang diinterpretasi oleh sekolah untuk merumuskan kebijakan dan program sekolah dalam rangka mewujudkan SRA di kawasan wisata pesisir di Gunungkidul. Alur pengembangan kebijakan dan program sekolah dalam kerangka implementasi SRA mengharuskan sekolah memperhatikan konteks sosio-kultural sekolah.

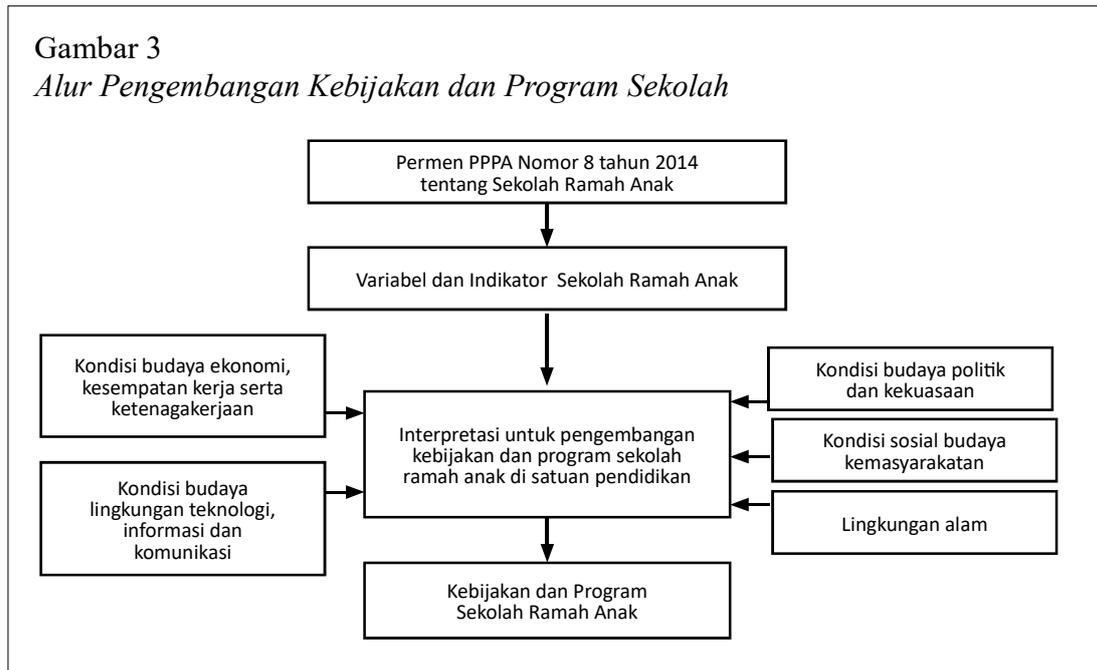
Gambar 3 menunjukkan tahap perumusan kebijakan dan program SRA di tingkat satuan pendidikan di kawasan pesisir. Kawasan pesisir memiliki masyarakat bersifat spesifik, karena kawasan ini memiliki lima karakteristik (Hajaroh *et*

Gambar 2  
Menejemen Sekolah Ramah Anak di Satuan Pendidikan



al., 2017). *Pertama*, lingkungan alam merupakan kawasan rawan dengan gempa, terlebih daerah pesisir jika terjadi gempa dengan kekuatan besar menjadi kawasan rawan tsunami. Seiring dengan perubahan pengelolaan kawasan pesisir menjadi kawasan wisata seperti di Gunungkidul membawa perubahan secara perlahan dan signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan sosial ekonomi ini bisa positif maupun negatif. *Kedua*, kondisi budaya ekonomi dan kesempatan kerja serta ketenagakerjaan. Alih fungsi lahan memunculkan lapangan

kerja baru yang berdampak pada pelibatan anak menjadi pekerja. *Ketiga*, kondisi budaya sosial kemasyarakatan, kedatangan wisatawan domestik maupun asing dengan budayanya memberikan dampak pada perubahan nilai-nilai, cara berpikir, pola-pola perilaku, dan gaya hidup yang positif maupun negatif. *Keempat*, kondisi budaya politik dan kekuasaan. Kawasan pesisir yang tengah mengalami perubahan untuk mengantisipasi dampak negatif pada pendidikan anak diperlukan kebijakan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik. Komponen-



komponen pemilik kekuasaan dan politik perlu dilibatkan dalam pengembangan sekolah dan pendidikan ramah anak. *Kelima*, kondisi lingkungan komunikasi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dialami pula oleh anak-anak di kawasan pesisir. Hal ini memberikan peluang anak-anak untuk mengakses informasi. Hanya saja informasi yang diakses oleh anak-anak seringkali negatif yang merugikan bahkan merusak mental dan moral.

Model analisis perumusan kebijakan ini menunjukkan alur bagaimana kebijakan dikembangkan dengan cara yang tepat. Dalam perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan diawali dengan menganalisis isu-isu pendidikan dalam konteks sosial budaya masyarakat untuk menemukan masalah-masalah yang tepat yang memerlukan solusi dengan kebijakan dan program pendidikan sekolah ramah anak. Dua langkah ini yakni menganalisis isu-isu kebijakan dan merumuskan masalah-

masalah kebijakan yang tepat merupakan langkah terpenting dalam serangkaian perumusan kebijakan. Santoso (2012) menyebutkan bahwa dalam proses kebijakan lebih sering terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah daripada salah dalam menemukan solusi masalah. Kesalahan dalam perumusan masalah meskipun mendapatkan solusi yang tepat tetapi tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya dalam masyarakat. Membuat kebijakan pendidikan yang menyeluruh yang terintegrasi dapat mengakomodasikan seluruh elemen untuk mempromosikan atau mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, *friendly*, untuk belajar dan ramah bagi penghuninya.

Penelitian difusi merupakan salah satu bentuk dari *dissemination-utilization* dari ilmu pengetahuan. Konsep dasar model *knowledge dissemination and utilization* menurut (Havelock *et al.*, 1971) dalam menyebarkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan ditentukan oleh Proses Transfer Ilmu Pengetahuan (*the knowledge*

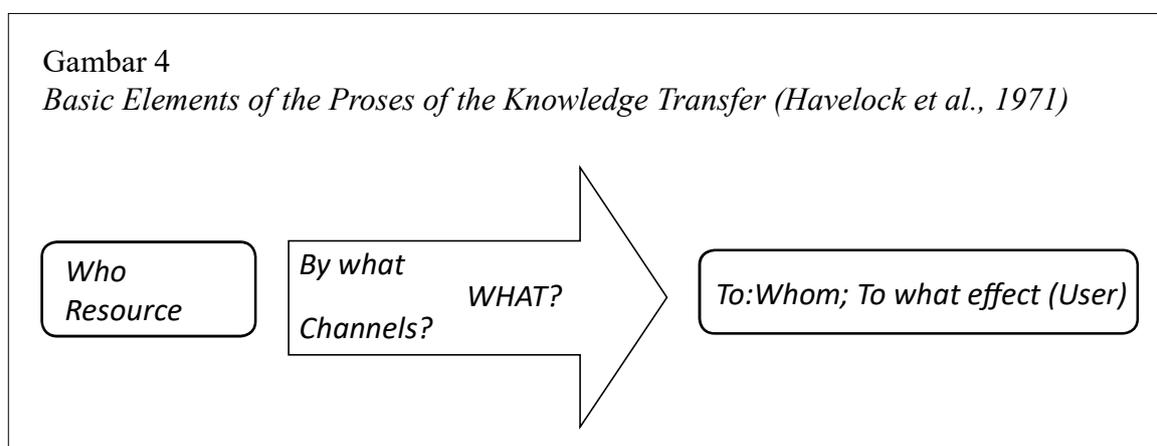
*transfer process*) dan Sistem Alur Ilmu Pengetahuan (*the knowledge flow system*). Elemen dasar dari proses transfer ilmu pengetahuan disajikan dalam Gambar 4.

Proses transfer ilmu pengetahuan (*the knowledge transfer process*) dipahami sebagai interaksi atau hubungan antara "user" yang potensial dengan "resource" yang potensial pula. Keduanya dapat dianalisis dengan enam kategori atau problem dengan formula *who says what to whom by what channel to what effect for what purpose*. Proses difusi (transfer ilmu pengetahuan) tentang model perumusan kebijakan sekolah ramah anak digambarkan pada Tabel 1.

Dalam proses transfer ilmu pengetahuan atau difusi inovasi saluran komunikasi menjadi bagian penting. Rogers (2010) menjelaskan empat elemen dalam difusi inovasi yakni: inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Model perumusan kebijakan sebagai inovasi, *workshop* sebagai saluran komunikasi, waktu dilakukan di tahun 2017 dan sekolah sebagai sistem sosial yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat sebagai tri pusat Pendidikan. Sebuah inovasi dapat diadopsi oleh sebuah sistem sosial ditentukan oleh individu-individu anggotanya. Oleh karena itu, adopsi oleh individu mengawali penelitian difusi pada organisasi sistem sosial.

Dalam difusi model ini, *workshop* merupakan saluran komunikasi kepada sistem sosial. Informasi tentang kebijakan sekolah ramah anak, strategi implemetasi ke tingkat satuan pendidikan dan pentingnya keterlibatan Tri Pusat Pendidikan dalam keseluruhan proses sekolah ramah anak disampaikan di dalam *workshop*. Tahap pengetahuan terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan dalam hal ini guru dan sekolah menerima informasi-informasi baru. Melalui saluran komunikasi yang disediakan mereka memahami bahwa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan dari atas sekolah perlu melakukan analisis perumusan kebijakan sebagai interpretasi terhadap kebijakan dengan analisis yang kontekstual sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah menjadi penggerak utama dalam implementasi kebijakan. Antusiasme peserta dalam berdiskusi menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap informasi pengetahuan baru. Mereka memiliki persepsi yang sama bahwa sekolah, orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab untuk mengimplementasikan SRA di masing-masing sekolahnya. Informasi yang diperoleh selama *workshop* merupakan pengetahuan yang relatif baru bagi peserta.

Selain itu, terlihat keterampilan menganalisis situasi sekolah dan masyarakat



Tabel 1

*Proses Transfer Model Perumusan Kebijakan Sekolah Ramah Anak*

<i>Who</i>	$\Rightarrow$ <i>transfer what</i>	$\Rightarrow$ <i>to whom</i>	$\Rightarrow$ <i>by what channel</i>	$\Rightarrow$ <i>to what effect</i>	$\Rightarrow$ <i>for what purpose</i>
Satu tim penelitian dari UNY	Model analisis perumusan kebijakan sekolah ramah anal	Kepala sekolah, guru, orang tua, anggota masyarakat (Tri Pusat Pendidikan)	<i>Packaging</i> model, publikasi, dan <i>men-setting</i> program <i>workshop</i>	Pemahaman dan orientasi sinergi peran Tri Pusat Pendidikan salam SRA. Ketrampilan analisis perumusan kebijakan di satuan pendidikan	Tersusun kebijakan dan program sekolah ramah anak Mewujudkan sekolah ramah anak.

untuk menemukan masalah mendasar yang terjadi di kawasan pesisir wisata. Ketajaman peserta dalam mengeksplorasi masalah-masalah mendasar di kawasan ini menjadi bagian penting yang menunjukkan bahwa mereka memahami dan mampu mengkritisi situasi di lingkungan mereka yang memungkinkan anak menjadi tidak aman dan nyaman. Mereka terlihat terbuka pada keberadaan inovasi (model analisis perumusan kebijakan) dan bersedia menambahkan pemahamannya pada fungsi inovasi tersebut dengan berdiskusi lebih lanjut untuk merumuskan solusi atas masalah-masalah yang mereka temukan. Kesiapan menambah pengetahuan dan ketrampilan baru ini menjadi karakteristik dari tahap pengetahuan dalam difusi individu (Rogers, 2010). Cowan dan Jonard (2009) mengatakan difusi pengetahuan terjadi ketika seorang agen menyiarkan pengetahuannya kepada agen yang terhubung langsung dengannya. Penciptaan pengetahuan muncul ketika agen menerima pengetahuan baru yang dikombinasikan dengan stok pengetahuan mereka yang ada. Dengan demikian pembuatan dan difusi adalah kegiatan yang bergantung pada jaringan. Dalam hal ini difusi pengetahuan terjadi antara tim peneliti dengan warga sekolah, penciptaan pengetahuan terjadi ketika tim melakukan penelitian pengembangan model. Pengembangan

dan difusi model ini bergantung kepada jaringan antara perguruan tinggi dengan dinas Pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan dasar di kabupaten/kota.

Pengetahuan merupakan pintu masuk sebuah inovasi. Pengetahuan ini mendorong munculnya sikap setuju - tidak setuju terhadap inovasi. Sikap atau kecenderungan setuju-tidak setuju terhadap sebuah model inovasi dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsi terhadap karakteristik inovasi yang memiliki karakter kebaruan. Kebaruan model dilihat dari lima karakteristik inovasi (Rogers, 2010) yakni: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dapat diujicobakan, dan dapat diamati. Hasil uji keinovatifan model pada guru, orang tua dan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses difusi disajikan pada Tabel 2 dan 3.

Skor perolehan dalam penilaian model analisis perumusan kebijakan SRA dari 5 kriteria inovasi menunjukkan bahwa model sangat bagus dan bagus. Dalam aspek keunggulan relatif skor yang paling tinggi adalah dengan model ini mendorong kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat berpikir akademis dalam menyusun kebijakan dan program sekolah. Pada aspek kesesuaian menunjukkan bahwa model ini cocok digunakan dalam perumusan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dengan melakukan kolaborasi antara Tri Pusat Pendidikan.

Tabel 2

*Penilaian Model Analisis Perumusan Kebijakan SRA dalam Keunggulan Relatif, Kecocokan Model, dan Kompleksitas*

No	Variabel Karakteristik Inovasi	Skor	Penilaian
1	Keunggulan Relatif ( <i>relative advantage</i> )	21,28	Sangat bagus
	a. Melakukan analisis perumusan kebijakan di sekolah ini merupakan hal yang baru bagi saya	4,22	sangat bagus
	b. Model analisis perumusan kebijakan melalui <i>workshop</i> ini memiliki keunggulan untuk pengembangan kebijakan sekolah	4,25	sangat bagus
	c. Strategi <i>workshop</i> untuk merumuskan kebijakan SRA ini tepat dilakukan di sekolah-sekolah	4,30	sangat bagus
	d. Aktifitas <i>workshop</i> ini mendorong kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat berpikir akademis dalam menyusun kebijakan dan program sekolah.	4,38	sangat bagus
	e. Dengan <i>workshop</i> ini kebijakan dan program sekolah sesuai dengan konteks budaya masyarakat sekitar sekolah	4,11	sangat bagus
2	Kecocokan Model ( <i>compatibility</i> )	20,5	sangat bagus
	a. Perumusan kebijakan dan program dalam <i>workshop</i> ini tepat/cocok untuk dilakukan di semua sekolah	3,88	bagus
	b. Cara-cara dan metode <i>workshop</i> untuk perumusan kebijakan ini cocok untuk dilakukan oleh kepala sekolah, guru, orang tua wali, dan tokoh masyarakat secara bersama-sama	4,11	sangat bagus
	c. Model analisis ini cocok untuk memasukkan nilai-nilai lokal dalam kebijakan dan program sekolah	4,11	sangat bagus
	d. Model analisis ini cocok untuk membiasakan perilaku kolaboratif antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak	4,27	sangat bagus
	e. Dengan model ini, sinergi nilai-nilai dalam pendidikan keluarga dan sekolah dan masyarakat akan terwujud	4,16	sangat bagus
3	Kompleksitas ( <i>complexity</i> )	20,5	Sangat bagus
	a. Model analisis perumusan kebijakan di sekolah ini merupakan model yang sederhana dapat dilakukan di sekolah-sekolah	4,19	sangat bagus
	b. Model ini yang memiliki karakteristik sederhana (tidak kompleks) menunjukkan bahwa model itu efektif	4,11	sangat bagus
	c. Alur merumuskan kebijakan dan program sekolah ini mudah dipahami oleh kepala sekolah, guru, orang tua wali maupun tokoh masyarakat.	4,22	sangat bagus
	d. Menyusun kebijakan dan program sekolah dengan cara ini mengoptimalkan potensi-potensi tripusat pendidikan	3,16	bagus
	e. Merumuskan kebijakan dan program dengan cara seperti ini tidak sulit bagi sekolah	4,11	sangat bagus

Keterangan: Kriteria: sangat bagus: skor 4-5; bagus: skor 3-4; jelek: skor 2-3; sangat jelek: skor 1-2

Tabel 3  
*Penilaian Model Analisis Perumusan Kebijakan SRA dalam Trialability dan Observability*

No	Variabel Karakteristik Inovasi	Skor	Penilaian
1	Dapat diuji cobakan ( <i>trialability</i> )	20,9	Sangat bagus
	a. Merumuskan kebijakan dan program dengan <i>workshop</i> seperti ini dapat diprktekan di sekolah-sekolah	4,08	sangat bagus
	b. Ketika saya mengikuti proses <i>workshop</i> , saya merasa bisa berkontribusi dalam mengembangkan sekolah	4,05	sangat bagus
	c. Semua sekolah dapat merumuskan kebijakan dan program sekolah dengan cara seperti ini.	3,86	bagus
	d. Merumuskan kebijakan dan program sekolah dengan cara seperti ini menarik bagi saya	4,11	sangat bagus
	e. Mengikuti aktifitas merumuskan kebijakan seperti ini saya merasa lebih diberberdayakan dan saya bisa melakukannya	4,07	sangat bagus
2	Dapat diamati ( <i>observability</i> ).	20,5	Sangat bagus
	a. Saya sekarang paham cara mengembangkan kebijakan dan program di sekolah.	3,91	bagus
	b. Partisipasi sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat dilihat pada saat merumuskan kebijakan dan program dengan cara seperti ini	4,14	sangat bagus
	c. Sinergi tripusat pendidikan dapat dilihat sejak merumuskan kebijakan dan program.	4,22	sangat bagus
	d. Perilaku partisipatif dari elemen tripusat pendidikan dapat dilihat dalam <i>workshop</i> ini	4,08	sangat bagus
	e. Saya mendapatkan hasil/rumusan kebijakan dan program yang disusun dalam <i>workshop</i> ini bermakna bagi sekolah, orang tua dan masyarakat.	4,19	sangat bagus

Keterangan: Kriteria: sangat bagus: skor 4-5; bagus: skor 3-4; jelek: skor 2-3; sangat jelek: skor 1-2

Juga mereka menyatakan bahwa cara-cara dan metode dalam perumusan kebijakan ini cocok untuk dilakukan oleh kepala sekolah, guru, orang tua wali, dan tokoh masyarakat. Kompleksitas (*complexity*) yang dimaksud yaitu kesederhanaan sebuah inovasi. Dengan kesederhanaan, inovasi akan lebih mudah dipahami dan digunakan. Pada aspek ini skor tertinggi pada penilaian bahwa alur merumuskan kebijakan dan program sekolah ini mudah dipahami oleh kepala sekolah, guru, orang tua wali maupun tokoh masyarakat. Karakteristik inovasi

ini juga memenuhi karakteristik dapat diujicobakan/dipraktikkan (*trialability*) dengan kategori sangat bagus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model analisis perumusan kebijakan pendidikan dengan strategi *workshop* dapat menjadi sebuah inovasi dalam merumuskan kebijakan SRA di tingkat satuan pendidikan.

Model ini efektif dilakukan di sekolah untuk menginterpretasi kebijakan nasional (makro) dan kebijakan daerah (meso) pada saat mengimplementasikan ke satuan pendidikan (mikro). *Workshop* yang ada

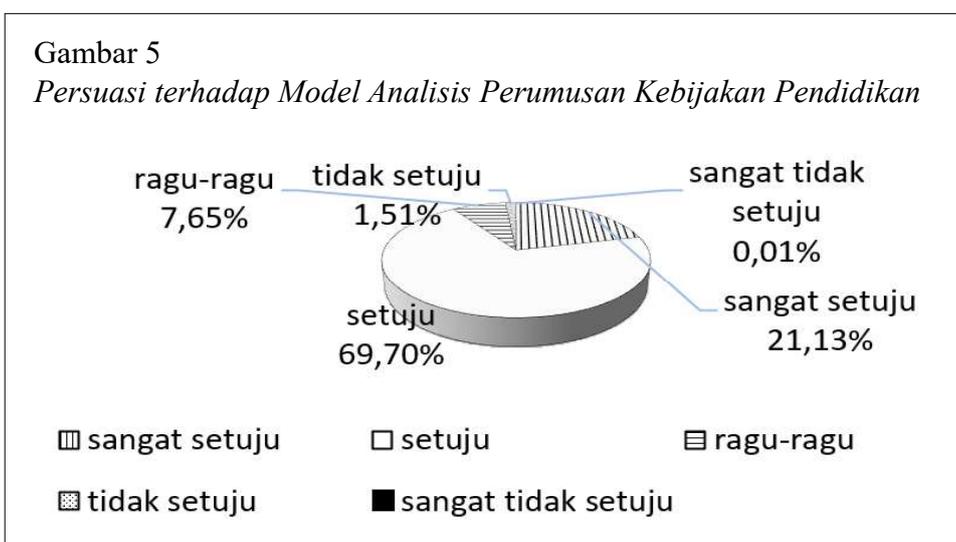
dalam model ini membangun kolaborasi yang sinergis antara tripusat pendidikan (sekolah, masyarakat, dan keluarga) dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Sinergitas Tri Pusat Pendidikan tidak hanya pada saat menginterpretasikan kebijakan dan program, tetapi juga pada pengorganisasian dan aplikasi kebijakan sekolah ramah anak. Gambar 5 menunjukkan persuasi atau sikap guru, orang tua, dan wakil masyarakat terhadap model analisis perumusan kebijakan. Mayoritas dari mereka 69,70% setuju terhadap model ini dan 21,13% sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyetujui bahwa model analisis perumusan kebijakan sekolah ramah anak sebagai inovasi.

Pengetahuan dan persuasi berdampak pada keputusan mengadopsi atau menolak inovasi (Rogers, 2010; Fry *et al.*, 2018) Persuasi juga berdampak pada difusi informasi (Das *et al.*, 2014). Keputusan terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan terikat dalam aktivitas yang memandu pada pilihan mengadopsi atau menolak inovasi. Hal ini terlihat ketika (kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat) secara bersama kompak mendiskusikan solusi terhadap berbagai

masalah dan menyusun ke dalam kebijakan dan program sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Perumusan kebijakan dan program SRA yang demokratis berisi rencana tindakan dengan manajemen berbasis sekolah. Manajemen ini digunakan sejak merumuskan masalah-masalah kebijakan, menentukan solusinya, merancang pengorganisasian dan aplikasi serta rencana evaluasi. Setiap sekolah yang terlibat memiliki keputusan untuk merancang sebaik mungkin kebijakan dan program SRA yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah sehingga SRA di setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Keunikan berbasis pada realitas yang ada ini menunjukkan bahwa mereka berparadigma pada fenomenologi bukan paradigma positivism (Rukiyati, 2016). Rencana tindakan menjadi bentuk keputusan peserta untuk sekolah mengadopsi model inovasi. Tabel 4 menyajikan kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan.

Gold (Alashwal *et al.*, 2014) berpendapat pemanfaatan pengetahuan yang efektif umumnya dianggap dicapai setelah pengetahuan diciptakan. Kebijakan dan program sekolah ramah anak sebagai pengetahuan baru yang dikreasi atau

Gambar 5  
*Persuasi terhadap Model Analisis Perumusan Kebijakan Pendidikan*



Tabel 4

*Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir*

No	Kebijakan	Program dan Kegiatan
1	Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari gangguan, ancaman, intimidasi, kekerasan, ketidakadilan pada anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyambut kedatangan anak dengan berjabat tangan.</li> <li>2. Berdoa pada saat sebelum dan sesudah belajar.</li> <li>3. Efektivitas pendampingan anak pada waktu istirahat.</li> <li>4. Penyuluhan hak-hak dan kewajiban anak di sekolah.</li> <li>5. Sosialisasi hak-hak dan kewajiban anak di sekolah setiap awal semester.</li> <li>6. Diskusi menemukan dampak positif dan negatif industri pariwisata.</li> <li>7. Menerapkan budaya 3S (salam, senyum, sapa)</li> <li>8. Pendampingan siswa dalam penggunaan alat/bahan menghadapi bencana tsunami</li> </ol>
2	Menciptakan pembelajaran berbasis kearifan lokal masyarakat di kawasan pantai Gunungkidul.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran muatan lokal karawitan.</li> <li>2. Melaksanakan pendidikan kewirausahaan (pengolahan hasil laut, pembuatan cenderamata khas setempat).</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan berbasis global bahasa Inggris.</li> </ol>
3	Memanfaatkan IPTEK sebagai daya dukung pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan <i>handphone</i>/komputer sebagai media sumber belajar.</li> <li>2. Mengadakan ekstrakurikuler fotografi.</li> <li>3. Pengolahan promosi wisata lewat internet.</li> </ol>
4	Meningkatkan kompetensi guru tentang pembelajaran di kawasan pantai Gunungkidul.	Diklat IT, Bahasa Inggris, fotografi, dan kewirausahaan untuk guru.
5	Meningkatkan partisipasi aktif wali/masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Workshop parenting</i>.</li> <li>2. Membentuk paguyuban wali murid di setiap kelas.</li> <li>3. Membentuk relawan efektivitas pendampingan siswa ketika istirahat.</li> <li>4. Membuat buku penghubung pantauan tumbuh kembang anak di rumah.</li> <li>5. Memberikan pelatihan dalam pengolahan hasil laut. Memberikan pelatihan pengolahan limbah olahan hasil laut.</li> <li>6. Memberikan pelatihan manajemen pemasaran hasil olahan laut dengan menggunakan IT bagi guru dan siswa.</li> </ol>

dihasilkan oleh sistem sosial (sekolah) sebagai respons terhadap keputusan menerima/mengadopsi. Kebijakan dan program dan telah dirumuskan menjadi acuan dalam pengembangan SRA dan akhirnya akan terjadi peningkatan mutu di setiap sekolah. Sekolah berkualitas menjadi salah satu tujuan akhir dari kebijakan SRA. Glasser (1992, p. 1) mengatakan pendidikan yang berkualitas merupakan satu jawaban dari masalah-masalah sekolah. Bahkan kualitas Pendidikan menjadi salah

satu masalah utama pendidikan nasional dan tentunya menjadi masalah sekolah. Tersusunnya rumusan kebijakan, program dan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa model konseptual perumusan kebijakan ini telah digunakan oleh *user* (sekolah) berkolaborasi dengan Tri Pusat Pendidikan. Model dapat diimplementasikan melalui *workshop* kepada pihak-pihak pengguna dan dapat menghasilkan keputusan kebijakan di level mikro sekolah. Tahap implementasi inovasi terjadi ketika adopter menggunakan

inovasi dalam aktivitasnya (Rogers, 2010). Dalam hal ini sekolah menggunakan model analisis perumusan kebijakan untuk merumuskan kebijakan SRA bagi satuan pendidikan.

Konfirmasi inovasi merupakan tahap adopter menambahkan tindakan untuk memperkuat keputusan mengadopsi atau mengubah keputusan dengan menolak inovasi (Rogers, 2010). Mengorganisasikan sumber daya sekolah dan mengaplikasikan program dan kegiatan yang telah diputuskan merupakan upaya konfirmasi yang dilakukan oleh sekolah. Observasi yang dilakukan pascaworkshop di sekolah menggambarkan sekolah mengaplikasikan kebijakan dan program yang diputuskan ke dalam berbagai kegiatan.

Komitmen terhadap kebijakan yang telah dirumuskan menjadi penentu bagi sekolah untuk memperkuat adopsi, meski-pun tidak terlepas dari berbagai kendala. Seperti perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena secara mendadak ada kegiatan dari dinas yang harus dilakukan sekolah sehingga jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan *action plan*-nya. Faktor penentu kedua adalah kepala sekolah yang menjadi ujung tombak implementasi. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan mengelola dan memimpin semakin memperkuat keberhasilan implementasi. Dukungan orang tua dan masyarakat yang konsisten juga menentukan keberhasilan aplikasi kebijakan. Hal ini terlihat pada sekolah yang mendapat dukungan secara konsisten dari unsur orang tua dan masyarakat menunjukkan keberhasilan yang lebih baik dari pada sekolah yang kurang mendapat dukungan. Partisipasi orang tua dalam memberikan pelatihan kewirausahaan pada anak cukup menarik dan perhatian anak-anak karena adanya keterikatan emosi dengan guru yang melatih. Kegiatan kewirausahaan dengan menggali dan mengembangkan kearifan

lokal lebih mendapat perhatian anak-anak menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan aplikasi kebijak-an dan program. Ketika anak-anak diberi tugas untuk menjual hasil karyanya dengan menawarkan pada wisatawan dan melaporkannya kepada guru kelas menjadi pengalaman berharga bagi anak dalam menjual hasil karya tersebut.

Dalam aplikasi program memerlukan tahap pengorganisasian yang melibatkan berbagai pihak dalam sistem sekolah dan peran dari lembaga pengawas sekolah untuk senantiasa memberikan dukungan yang terus menerus agar pemanfaatan inovasi menjadi efektif. Havelock (tth: 11-4) menjelaskan bahwa efektivitas pemanfaatan ilmu pengetahuan membutuhkan tingkat pembagian kerja, koordinasi dan kolaborasi dalam sistem sosial. Peran *government*/lembaga dalam memonitor alur ilmu pengetahuan yang “natural” bermakna mendukung, memfalisitasi, dan mengkoordinasikan aktivitas secara keseluruhan sehingga sistem berfungsi secara efektif.

## SIMPULAN

Proses difusi inovasi yang berupa model analisis perumusan kebijakan sekolah ramah anak menghasilkan adopsi inovasi oleh satuan pendidikan (sekolah dasar) di kawasan pesisir. Adopsi ditunjukkan adanya rumusan kebijakan, program dan kegiatan SRA dan aplikasi kebijakan di sekolah. Kolaborasi Tri Pusat Pendidikan dalam proses kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi. Model ini efektif dilakukan oleh sekolah untuk menginterpretasi kebijakan makro dan meso ke dalam kebijakan mikro. Dengan menggunakan tahapan analisis perumusan kebijakan sebagaimana dalam model, maka diimplementasikan kebijakan makro dan meso menjadi efektif dalam melakukan interpretasi dan merumuskan kebijakan baru di tingkat satuan pendidikan. *Work-*

shop sebagai saluran komunikasi dalam model ini mampu membangun kolaborasi yang sinergis antara Tri Pusat Pendidikan (sekolah, masyarakat, dan keluarga) dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Sinergitas tripusat pendidikan tidak hanya pada saat menginterpretasikan kebijakan dan program tetapi juga pada pengorganisian dan aplikasi kebijakan SRA.

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan pada sekolah agar mengagendakan aktivitas analisis kebijakan pendidikan dengan melibatkan Tri Pusat Pendidikan. Bagi pemerintah, Lembaga atau Yayasan pemilik satuan Pendidikan pentingnya melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah dalam implementasi sekolah ramah anak. Hal penting dilakukan agar pemanfaatan pengetahuan oleh sumber daya dapat dimonitor. Perlu ada difusi model analisis kebijakan SRA dan kebijakan pendidikan lainnya secara lebih luas agar diseminasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan hasil penelitian dapat optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alashwal, A. M., Abdul-Rahman, H., & Radzi, J. (2014). Knowledge utilization in construction projects: A conceptual framework. *Knowledge Management International Conference, August 2014*, 1-6. <https://doi.org/10.13140/2.1.4849.6961>
- Choudrie, J., Umeoji, E., & Forson, C. (2012). Diffusion of e-government in Nigeria: A qualitative study of culture and gender. *Third Annual SIG Globdev Workshop, Toronto*, 1-33. <http://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/8743>.
- Cowan, R., & Jonard, N. (2001). Knowledge creation, knowledge diffusion and network structure. Dalam A. Kirman & J-B. Zimmermann (Eds.), *Economics with heterogeneous interacting agents* (pp. 327-343). Springer.
- Damanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. *Management Science*, 42(5), 693-716.
- Das, A., Gollapudi, S., & Kiciman, E. (2014). *Effect of persuasion on information diffusion in social networks* (Issue MSR-TR-2014-69). [research.microsoft.com/pubs/217325/persuasion\\_2014-05-19.pdf](https://research.microsoft.com/pubs/217325/persuasion_2014-05-19.pdf).
- Dearing, J. W. (2009). Applying diffusion of innovation theory to intervention development. *Research on Social Work Practice*, 19(5), 503-518.
- Dearing, J. W., & Cox, J. G. (2018). Diffusion of innovations theory, principles, and practice. *Health Affairs*, 37(2), 183-190. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1104>.
- Dearing, J. W., & Singhal, A. (2020). New directions for diffusion of innovations research: Dissemination, implementation, and positive deviance. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 307-313. <https://doi.org/10.1002/hbe2.216>.
- Fry, A., Ryley, T., & Thring, R. (2018). The influence of knowledge and persuasion on the decision to adopt or reject alternative fuel vehicles. *Sustainability (Switzerland)*, 10(9), 1-20. [doi.org/10.3390/su10092997](https://doi.org/10.3390/su10092997).
- Glasser, W. M. D. (1992). *The quality school: Managing students without coercion* (2<sup>nd</sup> expanded ed.). HarperCollins Publishers.
- Gilardi, F., Shipan, C. R., & Wüest, B. (2021). Policy diffusion: The issue-definition stage. *American Journal of Political Science*, 65(1), 21-35.
- Graham, E., Shipan, C., & Volden, C. (2013). The diffusion of policy diffusion research. *British Journal of Political Science*, 43(3), 673-701.

- Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: Systematic review and recommendations. *The Milbank Quarterly*, 82(4), 581-629.
- Hajaroh, M., & Rukiyati. (2019). Difusi model pendidikan nilai pada anak usia dini melalui lagu dan permainan tradisional. *Jurnal Kependidikan*, 3(1), 1-14.
- Hajaroh, M., Rukiyati, Purwastuti, L. A., & Saptono, B. (2017). *Analisis kebijakan sekolah ramah anak di kawasan pesisir wisata*. Andi Offset.
- Harting, J., Rutten, G. M., Rutten, S. T., & Kremers, S. P. (2009). A qualitative application of the diffusion of innovations theory to examine determinants of guideline adherence among physical therapists. *Physical Therapy*, 89(3), 221-232.
- Havelock, R. G., Guskin, A., Frohman, M., Havelock, M., Hill, M., & Huber, J. (1971). *Planning for innovation through dissemination and utilization of knowledge*. Centre for Research on Utilization of Scientific Knowledge.
- Ismail, S. (2006). Detailed review of Roger's diffusion of innovations theory and educational technology. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 5(2), 14-23.
- Kaminski, J. (2011). Theory in nursing informatics column. *Canadian Journal of Nursing Informatics*, 6(2), 1-7.
- Katz, E. (2001). Media effects. Dalam N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (pp. 9472-9479). Pergamon. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04350-3>.
- Kumar, N. (2015). review of innovation diffusion models. *Working Paper*, 1, 01. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2413.0728>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- OECD, & Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018. Dalam *Handbook of Innovation Indicators and Measurement* (Issue October). <http://oe.cd/oslomanual>.
- OECD/Eurostat. (2018). *Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation* (4<sup>th</sup> ed.). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Rogers, E. M. (2010). *Diffusion of innovations*. Simon and Schuster.
- Santoso, B. (2012). Kunci keberhasilan proses pengambilan keputusan. *Manajerial*, 8(16), 28-33.
- Suranto, Hajaroh, M., & Hastasari, C. (2020). *Sistem komunikasi tri pusat pendidikan*. Tan Kinira. <http://avina.lecture.ub.ac.id/files/2012/06/9.1-sistem-komunikasi-kelompok.pdf>.
- Unicef. (2009). *Child friendly schools*. UNICEF.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wright, C. A. H., Mannathoko, C., & Pasic, M. (2009). *Child friendly schools manual*. UNICEF.